

**PEWARISAN NILAI KEPAHLAWANAN PANGERAN DIPONEGORO
DALAM PERANG JAWA**

***HEROISM VALUE INHERITANCE OF DIPONEGORO PRINCE
IN JAVA WAR***

Warto

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Kementerian Sosial RI
Yogyakarta, Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu Yogyakarta Indonesia
HP. 085740073552, Email: wartos63@yahoo.com

Naskah diterima 11 November 2016, direvisi 2 Desember 2016, disetujui 10 Desember 2016

Abstract

The study is done to reveal heroism value heritage of Diponegoro Prince in Java War. The approach used was qualitative-descriptive focusing on library study as the main base. Data gathered through tracking various informations collected from several literatures and documents which relevant to the goal of the study. It was found that heroism value from Diponegoro Prince in Java War included extraordinary brave and strong attitude, moral glorious, mental sturdy, and always gave attitude and simple live example. Based on the finding, it is recommended that generation as development pioneers and motivators fulfil independent era, should always base on heroism value heritage of Diponegoro Prince.

Keywords: Heritage, Heroism Values, Jawa War.

Abstrak

Kajian ini bertujuan menggali warisan nilai-nilai kepahlawanan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang lebih memfokuskan pada penelaahan kepustakaan sebagai basis utama. Pengumpulan data dilakukan dengan melacak berbagai informasi yang diperoleh dari sejumlah literatur ataupun dokumen yang relevan dengan tujuan pengkajian. Kajian menemukan, bahwa warisan nilai-nilai kepahlawanan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa meliputi sikap gagah dan keberanian yang luar biasa, keluhuran moral dan kekokohan mental, serta senantiasa memberikan keteladanan dalam berperilaku dan kesederhanaan hidup. Atas dasar temuan tersebut, direkomendasikan agar generasi penerus cita-cita bangsa selaku pelopor dan penggerak pembangunan dalam berjuang mengisi kemerdekaan senantiasa berlandaskan nilai-nilai kepahlawanan warisan Pangeran Diponegoro.

Kata Kunci: Nilai Kepahlawanan, Pangeran Diponegoro, Perang Jawa, Pewarisan.

A. PENDAHULUAN

Perjuangan rakyat pada berbagai daerah di Indonesia dalam upaya mengusir penjajah untuk merebut ataupun mempertahankan kemerdekaan, telah memberi gambaran kepada generasi muda bahwa sebegitu menggelora semangat juang dan jiwa kepahlawanan bangsa kita. Diantara perjuangan rakyat pribumi dalam melawan penjajah Belanda adalah Perang Jawa yang berlangsung di wilayah Kasultanan Yogyakarta antara tahun 1825 hingga tahun 1830. Perlawanan rakyat terhadap penjajahan Belanda tersebut dipimpin oleh Pangeran Diponegoro seorang bangsawan putra raja Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono III.

Bermodal ungkapan lokal sebagai semboyan, *rawe-rawe rantas, malang-malang putung* yang menurut Sagimun (1965: 7), berarti semua yang merintang akan diberantas dan semua yang menghalangi akan dipatahkan. Ungkapan lokal yang merupakan semboyan masyarakat setempat pada waktu itu mampu menggelorakan semangat juang dan menjadi jiwa perlawanan rakyat Jawa khususnya masyarakat Yogyakarta dalam mengusir penjajahan Belanda. Semboyan *rawe-rawe rantas, malang-malang putung* bahkan hingga saat ini masih mendasari daya perjuangan dan pengabdian masyarakat Jawa dalam segala aspek kehidupan.

Pangeran Diponegoro selaku pejuang yang memimpin perlawanan rakyat dalam Perang Jawa selama lebih kurang lima tahun (1825-1830), oleh pemerintah dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan disebutkan, gelar adalah penghargaan negara yang diberikan kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara. Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di daerah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa

hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan serta kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Gelar Pahlawan Nasional menurut dokumen di museum Sasana Wiratama Tegalrejo Yogyakarta dianugerahkan kepada Pangeran Diponegoro berdasar Surat Keputusan Presiden RI Nomor 087/TK/1973 tertanggal 1 Maret 1973, atas usulan Departemen Sosial melalui Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial. Apabila mengacu kriteria yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan pasal 25 dan pasal 26, Pangeran Diponegoro pantas mendapat anugerah gelar Pahlawan Nasional. Menurut Habib MS (2009: 49-51), setidaknya terdapat tiga alasan jiwa perjuangan sosok Pangeran Diponegoro tetap hidup dan dikenang sebagai pahlawan. Pertama, semasa hidupnya telah berjuang melawan penjajah Belanda di daerah Jawa bagian tengah dan timur khususnya Yogyakarta yang pada masa kemerdekaan ini menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedua, melakukan perjuangan hampir semasa hidupnya. Perlawanan yang dilakukan melalui perang mengusir Belanda memang hanya berlangsung selama lima tahun (1825-1830), tetapi dalam menjalani hidup di pengasingan mulai ditangkap di Magelang, ditahan di Semarang, Jakarta, Manado, dan dipindahkan di Makassar hingga akhir hayatnya selama lebih kurang 25 tahun. Pejuang ini wafat pada 8 Januari tahun 1855 di penjara Benteng Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang dan jenazahnya dimakamkan di Kampung Melayu Kota Makassar.

Ketiga, dalam berjuang Pangeran Diponegoro berlandaskan integritas moral dan sikap keteladanan serta pantang mundur jikalau tidak dikhianati Belanda, sehingga oleh masyarakat dipandang telah berjasa kepada bangsa dan negara. Selain itu, dalam melakukan perjuangan tidak pernah menyerah, meskipun kondisinya terdesak. Dalam kondisi terdesak bahkan digunakan strategi perang

gerilya pada malam hari dengan persenjataan seadanya seperti tombak, pedang, bambu runcing dan dilakukan secara berpindah-pindah markas antara lain di Pleret, Pengasih, Dekso, dan Goa Selarong. Dalam upaya mematahkan perlawanan Pangeran Diponegoro, Belanda akhirnya harus licik menggunakan cara tipu muslihat dengan dalih mau berunding di Kota Magelang yang sejatinya bertujuan untuk menangkap pejuang tersebut.

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi Pangeran Diponegoro sangatlah pantas untuk mengenang dalam arti membangun ingatan terhadap peristiwa luar biasa, yakni perlawanan terhadap penjajah Belanda melalui Perang Jawa dan selanjutnya mengakui pengabdian dan segala jasanya bagi bangsa dan negara. Perihal yang juga penting sesuai dengan konteks penelitian ini yakni menggali nilai-nilai kepahlawanan yang diwariskan oleh Pangeran Diponegoro dalam melawan penjajah Belanda melalui Perang Jawa.

Berdasar latar belakang sebagaimana dipaparkan, permasalahan kajian ini dirumuskan yakni apakah nilai-nilai kepahlawanan yang diwariskan Pangeran Diponegoro melalui Perang Jawa. Tujuan kajian ini adalah diketahui nilai-nilai kepahlawanan yang diwariskan Pangeran Diponegoro melalui Perang Jawa. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat, pertama sebagai landasan penyemangat para generasi muda dalam mengisi kemerdekaan melalui pembangunan berbagai aspek kehidupan. Di samping manfaat tersebut, keseluruhan naskah hasil pengkajian ini diharapkan juga bermanfaat menambah perbendaharaan khasanah ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang nilai-nilai kepahlawanan dan Perang Diponegoro, bagi generasi muda masa kini.

B. METODE KAJIAN

Pengkajian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni bertujuan mengungkap nilai-nilai kepahlawanan yang diwariskan Pangeran Diponegoro melalui Perang Jawa kepada generasi penerus cita-cita bangsa. Peneliti dalam mengkaji tidak melakukan studi lapangan, tetapi lebih memfokuskan pada penelaahan

kepuustakaan atau literatur sebagai basis utama pengkajian. Menurut Sunit Agus Tri Cahyono (2015: 229), studi kepuustakaan (*study Literature*) adalah pengumpulan data dengan melacak berbagai informasi yang diperoleh dari sejumlah dokumen yang relevan dengan masalah ataupun tujuan penelitian. Mengacu pendapat tersebut, kepuustakaan atau *literature* yang ditelaah dalam kajian ini bersumber dari catatan tertulis tentang kegiatan Pangeran Diponegoro semasa hidup dan berbagai peristiwa lain yang mendukung tujuan pengkajian yakni terungkapnya nilai-nilai kepahlawanan yang diwariskan oleh pejuang tersebut.

Studi dengan pendekatan kualitatif melalui kajian pustaka, menurut Lathiful Khuluq (2014: 149) akan memperoleh data bukan berupa angka, melainkan berupa informasi pihak berkompeten dari hasil wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen pribadi, memo, dan dokumen resmi lain dari pemerintah ataupun instansi terkait. Data berupa informasi yang terkumpul secara deskriptif kemudian dipilah-pilah untuk selanjutnya direduksi sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini.

Miles dan Huberman (dalam Sevilla, dkk. 2003: 54) berkaitan dengan konteks analisis ini menyatakan, bahwa aktivitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Sementara aktivitas analisis data dalam penelitian ini mengacu Idrus (2007: 54) yaitu mencakup data *reduction*, data *display*, *conclusion drawing/verification*).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perang Jawa

Perang Jawa atau dalam bahasa Belanda *De Java Oorlog* menurut Karel A. Steenbrink (1999: 59) berlangsung mulai tahun 1825 hingga 1830 di Pulau Jawa. Perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro ini merupakan peperangan terbesar yang dihadapi pemerintah kolonial Belanda selama menduduki Pulau Jawa sebagai bagian wilayah Nusantara.

a. Penyebab Timbulnya Perang Jawa

Kondisi yang melatarbelakangi sehingga

menjadi penyebab pecahnya Perang Jawa berdasar beberapa sumber dikelompokkan menjadi dua yaitu sebab yang bersifat umum dan sebab khusus. Berikut lima kondisi menjadi penyebab umum yang memicu terjadinya Perang Jawa. Pertama, ulah penjajah Belanda yang terus berupaya mempersempit dan memecah wilayah Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram yang relatif luas di bawah Raja Sultan Agung Hanyokrokusumo, terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil akibat pengaruh dan politik *divide ed empera* (adu domba) Belanda. Misalnya melalui perjanjian Giyanti 1755 Kerajaan Mataram terpecah menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Perjanjian Salatiga 1757 di Surakarta muncul kekuasaan baru Mangkunegaran. Pada 1813 di Yogyakarta juga muncul kekuasaan Pakualaman. Beberapa kondisi inilah yang dialami para raja yang dulu bersatu di bawah payung Kerajaan Mataram.

Kedua, masuknya budaya barat ke dalam Keraton Yogyakarta dari tahun ke tahun semakin besar, sehingga para pembesar Belanda jikalau menghadap raja duduk sejajar dengan Sultan. Adat kebiasaan keraton seperti Sultan menyajikan sirih untuk tamu termasuk pembesar Belanda yang menghadap dihapuskan. Perihal yang paling mengkhawatirkan adalah masuknya minuman keras di lingkungan para bangsawan dan bahkan beredar pula di kalangan masyarakat luas.

Ketiga, intervensi Belanda dalam urusan kerajaan. Belanda sebagai penjajah selalu intervensi dalam urusan kerajaan. Intervensi yang paling menyakitkan rakyat adalah mengenai pergantian tahta yang dilaksanakan Belanda. Sebagaimana disebutkan oleh Peter Carey (2014: 257), pada 6 Desember 1822 Hamengkubuwono IV meninggal di usia 19 tahun. GKR Kencono sang permaisuri memohon kepada pemerintah Belanda untuk mengukuhkan putranya yang masih berusia dua tahun menjadi Hamengkubuwono V. Pangeran Diponegoro diangkat menjadi wali dari keponakannya bersama Pangeran Mangkubumi. Tahun 1823 tahta keraton yang seharusnya diduduki kedua wali tersebut karena Sultan masih balita, ternyata ditempati oleh Residen Belanda yakni

Smisssaert, sehingga sangat melukai hati rakyat termasuk Pangeran Diponegoro. Campur tangan Belanda juga dalam hal penataan birokrasi kerajaan, misalnya pengangkatan pegawai yang ditugaskan untuk memungut pajak. Berikut intervensi Belanda yang digambarkan Frida Firdiani (2010: 10): hati Pangeran Diponegoro semakin sakit ketika melihat campur tangan Belanda yang semakin besar dalam persoalan Kerajaan Yogyakarta. Berbagai peraturan yang dibuat pemerintah Belanda menurutnya sangat merendahkan martabat raja Jawa. Sikap ini menunjukkan, bahwa ia memiliki sifat kepemimpinan dan kepahlawanan.

Keempat, pengurangan hak bangsawan dan *abdi dalem*. Sebelum kedatangan penjajah Belanda, Sultan Yogyakarta memiliki tradisi memberi jaminan hidup bagi *sentono dalem* (keluarga raja) berupa tanah *apanase*, dan kepada para *abdi dalem* (pegawai kerajaan) berupa tanah *lungguh* atau *bengkok*. Pada masa kolonial ini, tanah *apanase* dan tanah *lungguh* banyak yang diambil pemerintah Belanda, sehingga mengurangi sumber penghasilan mereka. Tindakan sewenang-wenang Belanda ini tentu menimbulkan sikap kebencian bagi kalangan Keraton Yogyakarta.

Kelima, terjadinya penderitaan rakyat karena beban berbagai pajak. Pada masa menjelang meletusnya perang Jawa, rakyat sangat menderita karena beragam pajak yang diberlakukan oleh pemerintah Belanda. Diantara pajak tersebut menurut Mawarti (2011: 84) meliputi *pejongke* (pajak pindah rumah), *kering aji* (pajak tanah), *pengawang-awang* (pajak halaman dan pekarangan), *pecumpling* (pajak jumlah pintu), *pajigar* (pajak ternak), *penyongket* (pajak pindah nama), dan *bekti* (pajak menyewa tanah atau menerima jabatan). Berbagai penarikan pajak ini sangat membebani dan membuat rakyat semakin sengsara.

Penyebab khusus meletusnya Perang Jawa adalah provokasi yang dilakukan penguasa Belanda, yaitu merencanakan pembuatan jalan dengan sengaja menerjang tanah dan makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Deretan patok rencana pembuatan jalan yang dibuat dari kayu dicabut dan diganti tombak

sebagai bentuk protes keras dari pihak Pangeran Diponegoro. Residen Smissaert berusaha berunding tetapi pejuang ini tidak bersedia menanggapi dan hanya mengutus Pangeran Mangkubumi. Asisten residen Chevallier berusaha menangkap kedua pangeran tersebut tetapi digagalkan barisan rakyat di Tegalrejo. Pangeran Diponegoro mendesak agar *antheke* Belanda Danurejo dipecat dari jabatan patih, surat desakan baru mulai ditulis mendadak rumah kediaman di Tegalrejo diserbu serdadu Belanda di bawah komando Chevallier. Kediaman Tegalrejo dibumihanguskan, namun Pangeran Diponegoro didampingi Pangeran Mangkubumi beserta keluarga berhasil meloloskan diri menuju Kalisoko sebelah barat daya Kraton Yogyakarta.

b. Jalannya Perang Jawa

Pada 20 Juli 1825 di daerah Kalisoko inilah Pangeran Diponegoro menyatakan perang suci membela agama Islam (Perang *Sabil*) menentang ketidakadilan Belanda. Banyak pangeran dan rakyat menyusul ke Kalisoko untuk bergabung memberikan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Dari Kalisoko Pangeran Diponegoro bersama pengikutnya berpindah menuju Goa Selarong yang berjarak 13 km dari Keraton Yogyakarta. Berlandaskan semangat *sadumuk bathok, senyari bumi kudu ditohi tekan pati*, yang menurut Nindya Noegraha (2010: 42) berarti sejari kepala, sejengkal tanah harus dibela sampai mati, serdadu Belanda yang mengejar dapat dibinasakan oleh pasukan Pangeran Diponegoro di bawah pimpinan Mulyo Sentiko.

Berpusat di Goa Selarong pasukan Diponegoro berhasil mengepung Keraton Yogyakarta sehingga keadaan menjadi kacau, Sultan Hamengkubuwono V yang masih kanak-kanak dan serdadu Belanda Menyingkir di Benteng Belanda Vredenburg. Perang berpindah dari satu daerah ke daerah lain dengan siasat perang gerilya. Menurut Peter Carey (2014: 306), taktik yang digunakan adalah bersembunyi di rerumputan tinggi di sisi jalan yang akan dilewati musuh, lalu menembak dalam formasi setengah lingkaran, yakni prajurit yang bersembunyi dalam posisi tiarap menembakkan bedil kearah

musuh yang disergap dari depan dan dari kedua sayap. Pangeran Diponegoro adalah panglima perang yang cakap, sehingga beberapa kali serdadu Belanda dikepung dan dibinasakan. Belanda sangat mengalami kecemasan, sehingga didatangkan serdadu yang berada di Sumatera, Sulawesi, Semarang, dan Surabaya untuk menghadapi laskar jihad Diponegoro, dan usaha tersebut untuk sementara sia-sia.

Pusat pertahanan yang semula di Goa Selarong dipindahkan ke Pleret. Semasa berpusat di Pleret ini gerakan pasukan Diponegoro meluas hingga Kedu, Semarang, Demak, Surakarta, Madiun, Surabaya, bahkan Banyuwangi. Kemenangan yang selalu diperoleh mampu membakar semangat rakyat sehingga mendorong bangsawan dan bupati untuk bergabung seperti Bupati Madiun, Kertosono, Nyi Ageng Serang, dan Pangeran Suriatmojo dari Banyumas. Sewaktu pertahanan berpusat di Pleret pada tanggal 9 Juni 1826 Pangeran Diponegoro sempat dinobatkan menjadi raja dengan gelar Sultan Abdul Hamid Herucokro Amirul Mukminin Sayidin Panatagama Chalifahtullah Tanah Jawa. Menurut Purwadi dan Megandaru W. Kawuryan (2005: 102), nama Sultan dipakai untuk mewujudkan suatu negara merdeka, yang mempunyai kedaulatan luhur bersendi kekuasaan *kawula dasih* (rakyat jelata) dan keadilan Tuhan. Gelar Sultan memang lazim dalam tatanegara Islam semenjak Keraton Demak dan Mataram, setelah runtuhnya Majapahit yang berperadaban kehinduan. Nama Amirul Mukminin, Panatagama, dan Khalifahtullah bermakna, bahwa negara dan masyarakat yang terbentuk adalah bersendi firman dan aturan yang diperintahkan oleh agama Islam. Pleret akhirnya juga diserbu serdadu Belanda, perlawanan rakyat dipimpin Kerta Pangalasan. Dalam perang ini laskar pribumi dibantu seorang pemuda yang gagah dan pemberani bernama Sentot Alibasyah Prawirodirjo, seorang putra Bupati Madiun Raden Ronggo Prawirodirjo.

Pusat pertahanan Pangeran Diponegoro dari Pleret selanjutnya dipindahkan lagi ke Dekso sebelah barat Sungai Progo. Serdadu Belanda terus mengalami kesulitan dalam menghadapi laskar Diponegoro, sehingga terpaksa

mendatangkan serdadu dari Negeri Belanda, yang kenyataannya serdadu tambahan tersebut juga dapat dihancurkan pasukan Diponegoro.

Berbagai kekalahan perang antara tahun 1825-1826 mendorong pemerintah Belanda pada tahun 1827 mengangkat Jenderal De Kock sebagai panglima perang di Jawa. Jenderal Belanda ini menggunakan siasat perang baru yang dikenal dengan Benteng Stelsell, yaitu siasat perang yang selalu menduduki daerah yang telah dikuasai dengan mendirikan benteng untuk mengawasi daerah sekitar, antara benteng satu dengan yang lain dihubungkan oleh serdadu gerak cepat. Pemberlakuan siasat benteng mulai tahun 1827 ini bertujuan untuk mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro dengan mendirikan banyak pusat pertahanan berupa benteng di daerah yang telah dikuasai Belanda.

Diberlakukannya Benteng Stel-sell ditambah usaha Belanda untuk menjauhkan dari pengikut setia seperti Sentot Alibasyah Prawirodirjo, sangat memukul perasaan Diponegoro sehingga perlawanan pejuang ini semakin melemah, meskipun pada pihak Belanda masih mencari segala upaya untuk segera mengakhiri Perang Jawa. Belanda berusaha menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tersebut. Cara licik yang ditempuh Belanda mengajak Pangeran Diponegoro untuk berunding di Magelang, dengan perjanjian jika perundingan mengalami kegagalan maka pejuang tersebut dapat melanjutkan kembali ke medan perang. Perundingan dilaksanakan pada 28 Maret 1830, dan ternyata perundingan tidak mencapai kesepakatan atau mengalami kegagalan. Pada waktu itu Belanda mengkhianati janjinya dengan menangkap Pangeran Diponegoro. Setelah ditangkap di Magelang pejuang tersebut dibawa ke Semarang, Batavia, dan pada 3 Mei 1830 diasingkan ke Menado. Pada 1834 dipindahkan ke Makassar hingga akhir hayatnya 8 Januari 1855 dalam usia 70 tahun.

2. Nilai Kepahlawanan Pangeran Diponegoro

Sebelum memaparkan nilai kepahlawanan yang diwariskan Pangeran Diponegoro, perlu dikemukakan apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kepahlawanan. Wardo (2006: 4) menyatakan,

nilai-nilai kepahlawanan adalah mutiara, makna, ataupun hikmah dari perjuangan para pahlawan yang dapat dikaji, dihayati, dan diteladani oleh setiap generasi muda saat ini dan pada masa mendatang. Kementerian Sosial melalui Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial (2012: 17) merumuskan, nilai-nilai kepahlawanan adalah suatu sikap dan semangat perjuangan dari para pahlawan yang menunjukkan keberanian secara luar biasa, tindakan tanpa pamrih pribadi ataupun golongan, serta memiliki moral, mental, dan perilaku yang mengandung suritauladan bagi bangsanya.

Mengacu rumusan tersebut, maka nilai-nilai kepahlawanan yang diwariskan Pangeran Diponegoro melalui Perang Jawa dalam berjuang mengusir penjajah Belanda bersama rakyat berhasil digali, pada intinya mencakup tiga nilai yang mendasar yaitu: 1) memiliki sikap keberanian secara luar biasa, 2) bertindak tanpa pamrih pribadi ataupun golongan, dan 3) memiliki moral, mental, dan perilaku yang mengandung teladan. Ketiga nilai tersebut secara rinci dapat dijelaskan dan dibahas pada bagian berikut.

Pertama, memiliki sikap dan semangat keberanian secara luar biasa. Perjuangan dan perlawanan Pangeran Diponegoro dilakukan berlandaskan sikap yang teguh, kokoh, dan prinsip keberanian. Pangeran Diponegoro memiliki prinsip, bahwa seorang pemimpin perang harus berani membela kepentingan, hak, martabat, dan kehormatan rakyat. Keberanian Pangeran Diponegoro dalam membela kepentingan dan hak rakyat digambarkan oleh Moelyono (1985: 11) dengan menyatakan, "Ketika pemerintah Belanda merencanakan pembuatan jalan yang sengaja menerjang rumah penduduk di daerah Tegalrejo, dengan maksud agar Pangeran Diponegoro marah dan menentang kompeni Belanda. Pangeran Diponegoro setelah mengetahui rencana tersebut benar-benar menjadi marah, sehingga patok-patok pembuatan jalan diperintahkan untuk dicabut dan diganti dengan tombak. Akhirnya Residen Smisvert tidak berani bertindak tegas terhadap Pangeran Diponegoro, dan untuk sementara waktu rencana pembuatan jalan tersebut ditangguhkan".

Sikap dan keberanian dalam membela kehormatan ditunjukkan oleh Pangeran Diponegoro dengan tidak mau tunduk karena bujukan kekuasaan, kedudukan, kekayaan, apalagi hanya berupa ancaman atau terror oleh Belanda. Sikap dan keberanian membela kehormatan dengan tidak tunduk dari rayuan kekuasaan dan kedudukan juga dipaparkan dalam Babad Cokronegoro (dalam Moelyono, 1985: 6) sebagai pengganti Sultan Hamengkubuwono IV diangkat putranya BRM Menol selaku Sultan Hamengkubuwono V. Karena baru berusia tiga tahun, dibentuklah suatu Dewan Perwalian dengan anggota Kanjeng Ratu Kencono (Ibunda Sultan), Pangeran Mangkubumi, dan Pangeran Diponegoro. Perwalian tersebut memang sudah diatur sedemikian rupa oleh Belanda agar kekuasaan Pangeran Diponegoro tidak terlalu besar. Sebab Belanda sangat takut kepada Pangeran Diponegoro yang sangat besar pengaruhnya terhadap rakyat. Pangeran Diponegoro yang sejak semula selalu menentang campur tangan Belanda dalam urusan intern kerajaan, karena menurutnya hal itu menyalahi hukum adat dan agama, karena tidak setuju dengan cara perwalian demikian, maka Pangeran Diponegoro memilih mengundurkan diri”.

Bagi seorang pemimpin semacam Pangeran Diponegoro, kekuasaan dan jabatan adalah taruhan dari sikap membela kepentingan rakyat, dengan prinsip siap dan sanggup melepas jabatan apabila merasa tidak berhasil membela kepentingan rakyat banyak. Diponegoro adalah sosok pahlawan yang berani meninggalkan tahta dan urusan pribadinya, supaya dapat mewujudkan cita-cita luhur yaitu tegaknya agama Islam di Jawa (Frida Firdiani, 2010: 23). Sikap dan keberanian sebagaimana dikemukakan waktu itu juga ditunjukkan oleh Pangeran Diponegoro. Beliau berani meloloskan diri dari kediaman yang dibumihanguskan oleh Belanda, hidup bersama rakyat untuk berjuang melawan penjajah dengan gagah dan keberanian yang luar biasa, hingga Belanda harus licik menggunakan cara tipu muslihat dalam upaya menangkapnya. Pangeran Diponegoro dengan jiwa yang tetap memberontak menerima

kenyataan meninggalkan tanah leluhurnya, dan hidup dalam pengasingan di Menado dan Makassar selama lebih kurang 25 tahun hingga akhir hayatnya pada 8 Januari 1955.

Kedua, bertindak tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Pangeran Diponegoro merupakan sosok seorang yang senantiasa memperjuangkan hak, kepentingan, dan kedaulatan seluruh rakyat, tidak saja kepentingan golongan bangsawan, apalagi hanya untuk kepentingan individu (segelintir orang). Bermodal karakter tersebut pejuang ini pada masanya dapat diterima dan dipercaya oleh segala lapisan masyarakat secara luas. Beliau adalah seorang pribadi yang berjuang tidak untuk mengarah suatu jabatan ataupun kedudukan di lingkungan Kerajaan Yogyakarta. Sebagaimana disebutkan dalam Babat Cakranegara (dalam Moelyono, 1985: 7), bahwa Pangeran Diponegoro tampak jelas kesederhanaan hidup dan keluhuran budi. Dari kata-kata yang sederhana menunjukkan, bahwa beliau jauh dari sikap serakah, lebih-lebih untuk menduduki tahta kerajaan seperti yang dituduhkan Belanda secara licik. Sebagai seorang yang soleh dan taat beragama beliau secara lahir mengutamakan kerohanian daripada keduniawian.

Ketiga, memiliki moral, mental, dan perilaku yang mengandung teladan. Pangeran Diponegoro adalah seorang tokoh pemimpin perang Jawa yang memiliki moral (budi pekerti) yang luhur. Betapa luhurnya moral pribadi Pangeran Diponegoro sebagaimana dikisahkan Cokronegoro (dalam Moelyono, 1985: 6) dengan menyatakan; ketika ayah Pangeran Diponegoro yaitu Sultan Hamengkubuwono III masih hidup dan menduduki tahta kerajaan, beliau menghendaki agar Pangeran Diponegoro sebagai anak sulung sanggup menggantikan sebagai Raja Yogyakarta, jikalau beliau wafat. Oleh karena itu, beliau menginginkan agar Pangeran Diponegoro bersedia diangkat sebagai Pangeran Adipati Anom (Putra Mahkota). Akan tetapi dengan tegas dan perasaan terharu Pangeran Diponegoro menolak seraya berkata pada ayahnya: “Dengan rasa terimakasih yang tiada terhingga anaknda menghargai

dan menjunjung tinggi keinginan Paduka ayahnda. Namun kehormatan yang setinggi itu saya serahkan dengan segala keikhlasan hati kepada adik anaknda (kelak menjadi Sultan IV). Sebagai kakak, saya akan membantu dengan segala daya dan nasehat". Demikian gambaran keluhuran *budi pekerti* atau sikap moral dan perilaku Diponegoro semasa hidupnya.

Pangeran Diponegoro sebagai pejuang juga memiliki mental baja, dengan kepribadian yang kuat dan tangguh. Seorang pejuang yang telah memberikan contoh kepribadian sebagai suritauladan dalam sejarah Perang Jawa. Kepribadiannya tidak dimiliki oleh setiap orang. Pribadi beliau dimunculkan dalam bentuk sikap yang senantiasa tabah dan tawakal dalam memberikan perlawanan untuk mengusir penjajah kolonialisme Belanda dari bumi Nusantara.

Memiliki perilaku yang mengandung teladan. Pangeran Diponegoro juga memberikan teladan dalam hal perilaku, yakni tindakan terpuji yang tidak mudah terlupakan sepanjang masa. Perilaku ataupun tindakan terpuji yang patut diteladani adalah sikap teguh yang anti penjajahan dengan tindakan terus berjuang untuk mengusir Belanda dari bumi leluhur Mataram yang diyakini sebagai tanah airnya. Purwadi dan Megandaru W Kawuryan (2005: 207) menyatakan, menilik tingkahlaku Pangeran Diponegoro bukan orang biasa. Melihat keberanian dan kebijaksanaan, beliau seorang manusia yang luar biasa, yaitu seorang pahlawan. Nilai kepahlawanan Diponegoro hidup selamanya sebagai pengawal kedaulatan bangsa yang dijunjung tinggi. Begitulah *labuh labet* (perjuangan) Pangeran Diponegoro pada negeri ini.

Perilaku dan tindakan terpuji lainnya di samping sebagai pemimpin perang Jawa, beliau juga sebagai pemimpin agama. Berkait dengan sebagai pemimpin agama ini, Frida Firdiani (2010: 22) menyatakan Pangeran Diponegoro adalah pejuang dan bangsawan Jawa yang mendalami agama Islam secara serius. Dalam perjuangannya, senantiasa melawan penjajah Belanda dengan semangat jihad dan fisabilillah. Keteladanan perilaku di bidang

agama ini membuat. Pangeran Diponegoro oleh para ulama pada masanya diberi gelar Sultan Ngabdulhamid Herucokro Kabirul Chalifatullah Panatagama Tanah Jawa (Moelyono, 1985: 24). Pemberian gelar tersebut menunjukkan, bahwa selain selaku pengemban tugas sebagai panglima tertinggi perang dalam upaya mempertahankan kedaulatan wilayah, juga sebagai pemimpin negara sekaligus sebagai ulama besar yang memimpin agama. Gelar Sultan mengandung makna, bahwa Pangeran Diponegoro dinobatkan sebagai kepala negara, sedangkan gelar Chalifatullah Panatagama Tanah Jawa menunjukkan, bahwa pejuang ini juga dinobatkan sebagai pimpinan agama Islam di tanah Jawa.

Nilai-nilai kepahlawanan yang diwariskan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa hingga saat ini memberi semangat pengabdian para generasi muda. Dalam perjalanan peneliti napak tilas menuju Goa Selarong, terlihat papan nama "Karang Taruna Dipo Ratna Muda" di depan Kantor Lurah Desa Guwosari, sebagai desa yang memiliki wilayah bersejarah tersebut. Penelusuran lebih lanjut melalui telaah dokumen laporan kegiatan Karang Taruna tersebut, ternyata nama "Dipo Ratna Muda" diambil dari penggalan nama Pangeran Diponegoro dan istrinya Ratnaningsih. Penggunaan nama tersebut ternyata mampu memberi motivasi pengabdian pemuda-pemudi di desa tersebut untuk lebih berprestasi. Terbukti Karang Taruna Dipo Retno Muda pada tahun 2009 menjadi juara nasional, dan pada tahun 2016 kembali menjadi juara tingkat provinsi sehingga mewakili Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi kandidat juara nasional bersaing dengan utusan dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali.

D. SIMPULAN

Melalui kajian dengan pembahasan sebagaimana dipaparkan dapat disimpulkan, bahwa nilai-nilai kepahlawanan yang diwariskan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa mencakup beberapa dimensi. Nilai kepahlawanan tersebut meliputi sikap gagah dan keberanian yang luar biasa, berjuang tanpa pamrih untuk kepentingan pribadi ataupun

golongan, tetapi demi mempertahankan wilayah dan kedaulatan rakyat. Memiliki keteladanan yang pantas diikuti generasi penerus cita-cita bangsa seperti moral (*budipekerti*) yang luhur, bermental baja yang mampu membangun semangat patriotisme yang bersifat heroik. Memiliki perilaku yang senantiasa menjadi teladan bagi setiap pejuang generasi muda masa kini.

Sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, diharapkan mampu merevitalisasi dan mengimplementasikan nilai-nilai kepahlawanan yang diwariskan para pahlawan. Dalam konteks ini nilai kepahlawanan Pangeran Diponegoro untuk mendukung pembangunan bidang kesejahteraan sosial di setiap daerah, dengan mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Revitalisasi dan internalisasi nilai kepahlawanan sangat diperlukan sebagai upaya mengevaluasi kembali terhadap upaya penanaman nilai kepahlawanan pada saat ini, sebagai model untuk menyejahterakan masyarakat. Revitalisasi dan internalisasi nilai kepahlawanan sebagaimana dimaksud dalam konteks kekinian, dapat juga dijadikan modal sosial untuk mengatasi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, dan kondisi keterbelakangan.

Atas dasar kesimpulan tersebut, direkomendasikan agar generasi muda selaku penggerak dan pelopor pembangunan dalam berjuang mengisi kemerdekaan senantiasa mengacu pada nilai-nilai kepahlawanan yang diwariskan Pangeran Diponegoro. Seorang pemimpin atau tokoh masyarakat misalnya, dalam memperjuangkan hak-hak rakyat harus penuh keberanian. Dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat hendaknya dilakukan secara tulus dan tanpa pamrih untuk kepentingan suatu kelompok apalagi untuk kepentingan pribadi. Dalam berperilaku atau bertindak keseharian, senantiasa menunjukkan suatu keteladanan seperti keluhuran *budi pekerti* dan bermoral baik, yang pantas dicontoh oleh warga masyarakat di lingkungan setempat. Pemerintah melalui Kementerian Sosial cq Direktorat Kepahlawanan,

Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial hendaknya menggali nilai-nilai kepahlawanan yang diwariskan oleh para pahlawan dari setiap daerah di wilayah Nusantara, yang kemudian perlu dirumuskan dalam bentuk indikator nilai-nilai kepahlawanan bangsa Indonesia. Indikator nilai-nilai kepahlawanan tersebut lebih lanjut perlu disosialisasikan untuk ditanamkan pada masyarakat terutama generasi muda, sebagai landasan gerak langkah dan penyemangat dalam berjuang mengisi kemerdekaan sesuai profesi dan bidang tugasnya.

Diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian, hingga tersusun naskah ini.

PUSTAKA ACUAN

- Budi Susanto. 2003. *Identitas dan Pastkolonialitas di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius
- Carey. 2009. *Raden Saleh: Diponegoro dan Lukisan Penangkapan Diponegoro di Magelang*. Jakarta: Komunitas Bambu
- _____. 2014. *Takdir Riwayat, Pangeran Diponegoro (1825-1830)*. Jakarta: Kompas
- Frida Firdiani. 2010. *Pahlawan Nasional Pangeran Diponegoro*. Jakarta: Bee Media
- Habib MS. 2009. *Kepahlawanan dan Pujaan bagi Pahlawan*. Majalah Adzan edisi Nopember 1999
- Idrus. 2007. *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: UII Press
- Karel A. Steenbrink. 1999. *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*. Jakarta: Bulang Bintang
- Kementerian Sosial. 2012. *Pedoman Prosedur Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional*. Jakarta: Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial
- _____. 2015. *Rangkaian Kegiatan Hari Pahlawan*. Jakarta: Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial
- _____. *Pedoman Pembinaan Warakawuri/Keluarga Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan/Janda Perintis Kemerdekaan*. Jakarta: Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial
- Lathiful Khuluq. 2014. *Peran Pesantren dalam*

- Pengembangan Masyarakat – Media Informasi Kesejahteraan Sosial* Vol. 38 Nomor 2 Juni 2014
- Mawarti. 2011. *Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SMP/MTS Kelas VII*. Jakarta: Balai Pustaka
- Moelyono. 1985. *Sejarah Perang Diponegoro 1925-1930*. Yogyakarta: Sasana Wiratama Tegalrejo
- Nindya Noegraha. 2010. *Babad Diponegoro*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan*
- Purwadi dan Megandaru W. Kawuryan. 2005. *Sejarah Perjuangan Pangeran Diponegoro*. Yogyakarta: Tunas Harapan
- Sagimun. 1965. *Pahlawan Diponegoro Berjuang (Bara Api Kemerdekaan Nan Tak Kunjung Padam)*. Jakarta: Gunung Agung
- Sevilla, dkk. 2003. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press
- Sunit Agus Tri Cahyono. 2015. *Opresi Buruh Migran Indonesia di Luar Negeri*, *Media Informasi Kesejahteraan Sosial* Vol. 39 Nomor 3 September 2015
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang *Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan*
- Warto. 2006. *Pengaruh Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan terhadap Kemandirian Pejuang Veteran*. Yogyakarta: B2P3KS Press
- _____. 2014. *Masyarakat Desa dan Kearifan Lokalnya dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial*. Yogyakarta: Citra Media